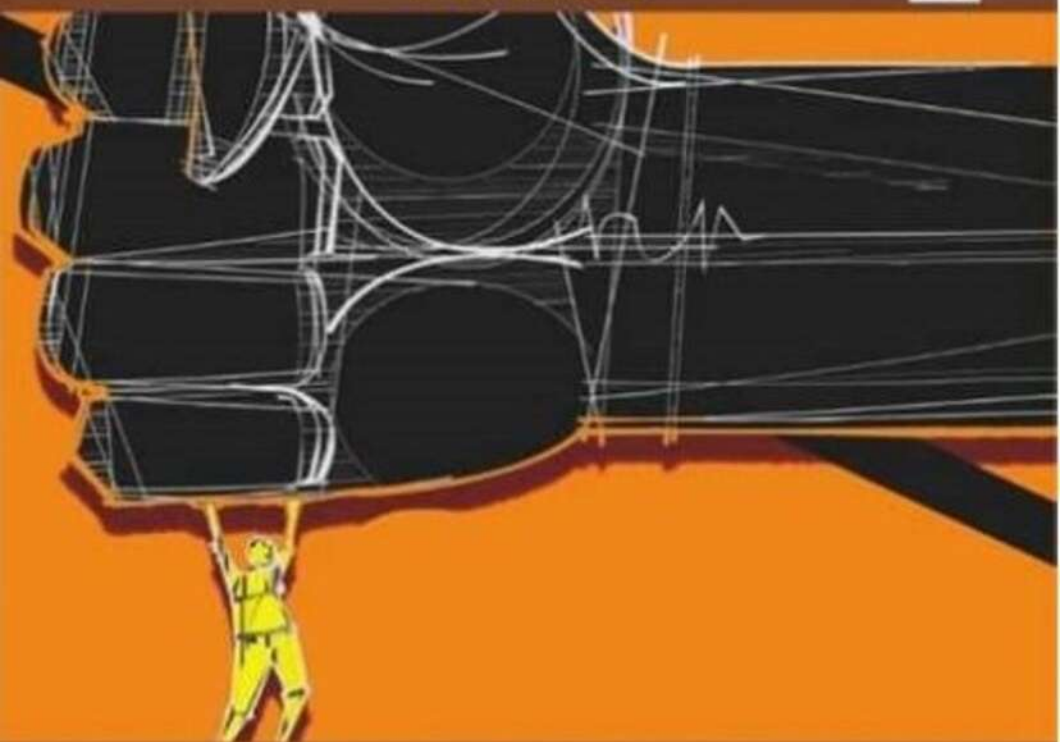


ALIRIDO

R



KONSTITUSI, MOBOKRASI, DAN DEMORITER

Kata Pengantar

Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H

(Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011-2015)

Zuhad Aji Firmantoro, SH., MH. (Ed.)

Ali Rido

Konstitusi, Mobokrasi, dan Demoriter



Konstitusi, Mobokrasi, dan Demoriter

Copyright © Ali Rido

Penyunting: Zuhad Aji Firmantoro, SH., MH.

Penata Letak: rl. lendo

Perancang Sampul: Aulia Rahmat SM

Cetakan 2021

xvi+248; 14 x 20 cm

ISBN: 978-602-0787-71-8

Diterbitkan oleh:

RELASI INTI MEDIA (Anggota IKAPI)

Jl. Veteran, Gg. Manunggal No. 638 C RT/RW. 20/05

Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta

Telp: 0274-4286584

Email: redaksi@relasibuku.com

Prakata

KEPASRAHAN atas *qadha'* Allah SWT dengan ketundukan pada kekuasaan-Nya yang tak tertandingi, telah meniscayakan saya untuk senantiasa mengucapkan tahmid, *Alhamdulillah wa Syukurillah*, sebagai rasa kagum atas samudra kasih yang dihamparkan secara gratis dan tak terhingga. Selanjutnya, marilah tak henti-hentinya kita haturkan Sholawat dan Salam kepada Rasulullah SAW. yang telah mengajari kita untuk mengenal tradisi tidak menuduh jika berlaku khilaf ataupun menepuk dada keangkuhan ketika keberhasilan diraih.

Inferior, pesimis, dan ragu rasanya menjadi barisan kata yang menyelimuti saya sebelum akhirnya nekat menghimpun kumpulan tulisan ini ke dalam sebuah buku dan menerbitkannya. Setidaknya ada dua alasan yang menjadikan keragu-raguan itu menyeruak, pertama, saat ini tengah tumbuh wacana-wacana baru dari para penulis dan ilmuwan hebat yang kadang secara akademik membuat saya iri sehingga saya pun khawatir materi dalam buku ini nantinya hanya akan menjadi involusi bacaan.

Kedua, menerbitkan sebuah buku kumpulan tulisan di zaman tsunami media *online* seperti sekarang, barangkali dapat disebut sebagai sebuah pertaruhan. Sementara saya meyakini setiap penulis yang berani menerbitkan naskah membutuhkan pembaca--begitu pula buku ini--dan bagi penerbit pastinya membutuhkan pembeli. Saya menyadari bahwa di tengah kemudahan akses sumber bacaan yang kini merebak di dunia maya, bukan cara mudah untuk tetap membangun kepercayaan diri sehingga yakin untuk istikamah menerbitkan sebuah buku.

Buku ini berasal dari banyak sumber, terutama dari tulisan-tulisan opini yang telah dimuat di berbagai media seperti Kompas, Republika, Sindo, Jawa Pos, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, dan lainnya. Dari sekian banyak tulisan yang ada dalam buku ini, tentu tidak seluruhnya hasil potretan terhadap momen atau kejadian tertentu, melainkan ada pula tulisan yang merupakan tafsir atas sebuah gejala. Dua hal itu sengaja saya kombinasikan dengan harapan tulisan ini senantiasa dapat dijadikan refleksi, kontemplasi, dan akan dibaca kapan saja sehingga tidak menjadikannya pergi bersama waktu.

Buku ini terbit bukan dalam rangka untuk berkontribusi bagi dunia akademik. Rasanya itu telalu gagah dan berani bagi saya yang masih pada level harus banyak belajar. Namun setidaknya, buku ini dapat menjadi kesaksian dan pembenar bagi saya atas semboyan *Cogito Ergo Sum* (aku berpikir maka aku ada) dari Descartes. Kalaupun terdapat manfaat dalam buku ini, maka seraya berdoa

mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang dapat membebaskan saya kelak di akhirat atas dosa yang telah diperbuat.

Akhirnya, saya serahkan pada pembaca untuk memberi label dan kualifikasi atas isi buku ini. Apabila pembaca merasa tak menemukan gagasan baru, itulah kelemahan nyata dari buku ini. Karena-nya, saya dengan senang hati dan senantiasa menunggu saran dan kritik konstruktif dari pembaca yang budiman.

Selamat meniikmati.

Salam Hormat,

Ali Rido

Kata Pengantar

BUKU ini menarik! Saat mulai memilih dan memilah judul untuk mendapatkan sesuatu yang khas dari daftar isi buku ini, ada dua kosa kata yang mencuat dan mencuri perhatian “*demoriter*” dan “*mobokrasi*”.

Ini tentu keren. Saya sebagai pihak yang tidak “melulu” membaca diskursus ketatanegaraan, “digedor” dengan penggunaan kosakata demoriter dan mobokrasi. Kosakata itu seolah “menonjok” keingintahuan untuk memahami lebih mendalam.

Dalam perjalanan mencari tahu, tetiba kursor mengarah pada satu sosok yang sangat fenomenal dan dikenal di jagad raya, Donald Trump. Pengusaha sukses yang pernah empat kali bangkrut itu mengalahkan Hillary Clinton. Hillary sendiri merupakan calon presiden perempuan pertama—sejak 240 tahun—yang mendapat suara mayoritas dari partai terbesar Amerika setelah kalahkan saingannya, Bernie Sanders.

Tapi siapa nyana, Trump memenangkan pemilihan Presiden di Amerika Serikat. Sebanyak 276 suara pemilu (*electoral votes*) dari seluruh negara bagian berhasil disabet Trump. Dia menjadi Presiden Amerika ke-45 yang dilantik pada 20 Januari 2017. Pada kali itulah, pelantikan Presiden juga disertai demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh negara bagian yang memprotes kemenangan Trump.

Tidak hanya itu, Trump juga dituding sebagai pemuja diktator. Salah satu tulisan di NBCNews berjudul *Donald Trump's History of Praising Dictators* mengonfirmasi dan menuliskan kekaguman Trump pada para diktator,¹ bahkan setelah jadi Presiden.

Trump dikabarkan menyebut Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, sebagai “diktator favorit”. Kalimat langsungnya “*Di mana diktator favorit saya?*” Kabar yang dipublikasikan oleh The Wall Street Journal itu terjadi ketika pertemuan G7 di Biarritz, Perancis, seperti dikutip The Independent.²

Trump juga dikenal dan dituding telah mendorong kekerasan di kalangan pendukung, mengancam akan memenjarakan saingannya, dan menyebut media arus utama sebagai “musuh”. Semua itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tengah menapaki jalan menuju otoriterisme. Majalah Foreign Affairs (April, 2017) dengan judul *Is America Still Safe for Democracy?* menuliskannya.

1 <https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/donald-trump-s-history-praising-dictators-n604801>

2 <http://french.presstv.com/Detail/2019/09/14/606150/US-Egypt-favorite-dictator-human-rights-Donald-Trump>

Dengan begitu ada situasi paradoks: Kendati ada lembaga-lembaga demokratis dalam suatu sistem, tapi pemerintahnya justru menyalahgunakan kekuasaan negara dengan membungkam para pengeritik karena dianggap sebagai lawan-lawan politiknya.

Uraian di atas menimbulkan pertanyaan dan menguatkan sinyalemen: *Apakah ini yang namanya “Demoriter”?* Sebuah watak & wajah baru dari sikap otoriter yang berselimut demokrasi. Angin kencang otoritarianisme seolah tengah menerjang buritan kenegaraan.

Di penghujung tahun 80-an, di berbagai belahan dunia satu demi satu rezim otoriter dan para diktatornya dipaksa mengakhiri kekuasaannya karena otoritarianisme tak mampu lagi memenjara hasrat masyarakat sipil untuk medesakkan kedaulatannya.

Apakah saat ini arah angin telah berbalik? Proses demokratik yang terlihat dalam proses pemilihan presiden justru malah memunculkan dan memenangkan figur yang punya watak otoritarian serta mengubah *landscape* sistem kekuasaan demokratis.

Pertanyaan menariknya; Apakah kondisi di Indonesia saat ini sudah menuju-atau jangan-jangan sedang berada dalam-sistem “demoriter”? Berbagai tulisan yang dikemukakan di dalam buku ini seolah memberikan sinyal yang kuat bahwa anomali demokratik begitu terasa sekali. Selama ini, sebagaimana kalangan menyebutkan dengan sangat sopan sebagai pseudo-demokrasi karena hanya mengedepankan demokrasi prosedural semata.

Ada pula saudara kembar potensial dari “demoriter” yang disebut sebagai “mobokrasi”. Dia hadir jika sikap otoriter itu tidak hanya berpucuk pada satu pihak saja tapi bisa juga dilakukan banyak kalangan yang menjadi bagian dari *The Rulling Parties*.

Pendeknya, ada kepentingan banyak kalangan yang tidak bersifat tunggal dari bagian kekuasaan itu sendiri tapi bekerja untuk kepentingannya sendiri sehingga kerap muncul “kekisruhan” di antara elit kekuasaan itu sendiri. Bukan tidak mungkin terjadi “gontok-gontokan” dalam berbagai bentuk mulai dari saling silang kritik dan pendapat hingga perilaku “tak senonoh” dan “anarkis”.

Secara perlahan tapi pasti, “Mobokrasi” dipastikan akan melemahkan institusi-institusi hukum dan demokrasi. Biasanya akan dimulai dari kebijakan yang “*mencla-mencle*” sehingga akan memproduksi kebingungan, kekalutan, dan berujung pada kekacauan.

Yang membuat cilaka dan sangat menakutkan, kesemuanya itu potensial dimanfaatkan untuk membenarkan dilakukannya penggunaan kekerasan yang dijustifikasi sebagai upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Justifikasi yang tidak berpijak pada dasar legitimasi.

Mobokrasi ini yang pada akhirnya dapat memberi kesempatan kepada massa untuk menampilkan dirinya sendiri sebagai ‘penentu hukum’ dengan menggunakan jalan kekerasan. Ada tindakan persekusi atas kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul. Hal itu dilakukan sebagian kalangan dengan dalih untuk melindungi kepentingan suatu kelompok atau daerah tertentu.

Uraian di atas bukan tidak ditujukan untuk membuat artikel sendiri di luar daftar isi, tapi hendak menjelaskan bahwa ada sesuatu yang khas dan menarik jika membaca secara teliti berbagai tulisan lepas buah karya dari penulisnya yang dirangkum dalam buku ini.

Selamat atas penerbitan buku ini. Tidak ada pilihan lain, seorang pengajar harus terus mengasah kepiawaiannya dalam menuliskan pokok pikirannya. Kesemua itu adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk turut “membenahi” berbagai problem yang tengah menyerbu labirin sesuai dengan minat dan kompetensinya.

Semoga penerbitan buku ini dapat mendorong penulis untuk terus berkiprah dengan tulisan menarik lainnya serta dapat memicu kolega dosen lainnya untuk “berlomba-lomba” berpihak pada kepentingan kemaslahatan dengan menuliskan otentisitas pikirannya.

Sekali lagi selamat dan tabik.

Salam,

Bambang Widjojanto

Daftar Isi

Prakata	iii
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	xiii

BAGIAN KESATU:

DEMOKRASI DAN MOBOKRASI DALAM PEMILU

MENCEGAH KEBABLASAN DEMOKRASI.....	1
MEMBANGUN POROS CERDAS-REALISTIK KAMPANYE	6
CALON PERSEORANGAN DAN KEMENANGAN DINI PARPOL..	10
IRONI WAKIL RAKYAT DI DAERAH.....	14
CALEG KORUPTOR.....	18
MENANGLAH DENGAN TERHORMAT	
DALAM KONTESTASI PILKADA SERENTAK	22
MENYONGSONG ERA PEMIMPIN MUDA PEMALANG	26
MENAKAR PROBLEMATIKA PILKADA SERENTAK	30
MOBOKRASI PASCA PILKADA.....	35

MEMPERBAIKI DATA PEMILIH.....	39
MENYOAL KAMPANYE PEJABAT.....	43
MEMBACA GEJALA KEKUASAAN DEMORITER.....	47
MENGUATKAN DEMOKRASI YANG RAPUH.....	51
BUDAYA LATEN KONFLIK PILKADA.....	55
PROBLEM PILKADA (SERENTAK).....	59
LEGALITAS DAN LEGITIMASI DALAM PEMILU.....	62

BAGIAN KEDUA:

POLITIK KETATANEGARAAN INDONESIA

MK DAN PEMBENAHAN PROSES LEGISLASI.....	67
NASIB PERADILAN KHUSUS PILKADA.....	72
MEWASPADAI KEKUASAAN DEMORITER.....	76
MENIMBANG AMBANG BATAS PILPRES.....	80
SISTEM PILKADA SEAKAN-AKAN BIANG KEROK KORUPSI.....	86
PATI POLRI DAN PENJABAT GUBERNUR.....	89
PROBLEM SERIUS PUTUSAN BAWASLU.....	94
KONSEKUENSI PKPU LARANGAN EKS KORUPTOR.....	98
SEKALI LAGI, NETRALITAS TNI DAN POLRI.....	99
MEMUPUK KEBERANIAN KPU PASCA PUTUSAN MA.....	102
PUTUSAN MA DAN PROBLEM KETATANEGARAAN.....	107
PARADOKS KEADILAN SUBSTANSTIF MAHKAMAH	
KONSTITUSI.....	112
PENGADUAN KONSTITUSIONAL PADA MAHKAMAH	
KONSTITUSI.....	117

POLITIK HUKUM KETETAPAN MPR.....	121
<i>QUO VADIS RECALL</i> ANGGOTA DEWAN.....	125

BAGIAN KETIGA:
REALITAS JAMINAN HAK ASASI MANUSIA

ANAKRONISME NEGARA ATAS AGAMA.....	129
NARKOBA DAN KONTROVERSI HUKUMAN MATI.....	135
PEMBUBARAN ORMAS.....	139
LEGALITAS HUKUMAN MATI.....	143
LGBT DAN DALIL HAM.....	148
MODEL PRISMATIK BERAGAMA.....	152
HAM DALAM ISLAM.....	156
GELIAT PERDA SYARIAH.....	159
NAFAS KONSTITUSI DAN BUKU “BERPAHAM KIRI”.....	163
<i>PEOPLE POWER</i> DAN FRAGILITAS DEMOKRASI.....	166

BAGIAN KEEMPAT:
IRONI PENYELENGGARA NEGARA

KABINET KOMPROMI ALA JOKOWI.....	171
OTT HAKIM DAN PROBLEM PENGAWASAN.....	175
ETIKA (YANG) ARIF.....	180
MENCEGAH OTT KEPALA DAERAH.....	183
MENJAGA NETRALITAS POLRI.....	188
PANSEL HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	192

ROBOHNYA INTEGRITAS MAHKAMAH KONSTITUSI.....	196
PROBLEMATIKA PERDA KAWASAN TANPA ROKOK	200
CITRA KEKUASAAN DEMORITER.....	205
MENATA PARPOL SEBAGAI PILAR DEMOKRASI.....	209
HILANGNYA LEGITIMASI BERHUKUM	213
KONTROVERSI QANUN ACEH	217
GARIS PENUNTUN PENENTUAN KABINET	221
KONTINUITAS DARURAT KESEHATAN.....	225
PERUBAHAN MINOR UU MK	230
OLIGARKI BEREBut KURSI MPR.....	237
WAKIL MENTERI YANG (IN) KONSTITUSIONAL.....	240
ALASAN SALAH KETIK.....	243
Referensi.....	245
Biodata Penulis.....	247

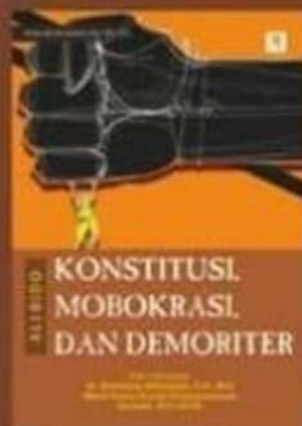
Referensi

- Mencegah Kebablasan Demokrasi (*Kompas*)
- Pembubaran Ormas (*Koran Republika*)
- Narkoba dan Kontroversi Hukuman Mati (*Jawa Pos*)
- Citra Kekuasaan Demoriter (*Koran Sindo*)
- Hilangnya Legitimasi Berhukum (*Koran Sindo*)
- Ironi Wakil Rakyat di Daerah (*Koran Sindo*)
- Memperbaiki Data Pemilih (*Koran Sindo*)
- MK dan Pembentukan Proses Legislasi (*Koran Sindo*)
- Problem Serious Putusan Bawaslu (*Koran Sindo*)
- OTT Hakim dan Problem Pengawasan (*Koran Sindo*)
- Problematika Perda Kawasan Tanpa Rokok (*Koran Bisnis Indonesia*)
- Putusan MA dan Problem Ketatanegaraan (*Majalah Mahkamah Konstitusi*)
- Memupuk Keberanian KPU Pasca Putusan MA (*Detiknews*)
- Menanglah dengan Terhormat dalam Kontestasi Pilkada Serentak (*Detiknews*)
- Menimbang Ambang Batas Pilpres (*Koran Tribun News*)

- Kabinet Kompromi Ala Jokowi (*Koran Tribun News*)
- Mencegah OTT Kepala Daerah (*Koran Suara Merdeka*)
- Membangun Poros Cerdas-Realistik Kampanye (*Koran Kedaulatan Rakyat*)
- Calon Perseorangan dan Kemenangan Dini Parpol (*Koran Kedaulatan Rakyat*)
- Caleg Koruptor (*Koran Kedaulatan Rakyat*)
- Menyoal Kampanye Pejabat (*Geotimes*)
- Membaca Gejala Kekuasaan Demoriter (*Geotimes*)
- Memperkuat Demokrasi Yang Rapuh (*Geotimes*)
- Nasib Peradilan Khusus Pilkada (*Koran Kedaulatan Rakyat*)
- Mewaspada Kekuasaan Demoriter (*Koran Kedaulatan Rakyat*)
- Anakronisme Negara Atas Agama (*Majalah Pranala*)
- Legalitas Hukuman Mati (*Koran Kedaulatan Rakyat*)
- Etika (Yang) Arif (*Koran Kedaulatan Rakyat*)
- Menakar Problematika Pilkada Serentak (*Bening Post*)
- Mobokrasi Pasca Pilkada (*Koran Bernas*)
- LGBT dan Dalil HAM (*Koran Harian Jateng*)
- Menyongsong Era Pemimpin Muda Pemalang (*Koran Harian Pemalang*)

Biodata Penulis


ALI RIDO lahir di Pemalang, saat ini mengabdikan sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Pendidikan formal kesarjanaannya ia selesaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sementara pendidikan nonformal pernah ditempuh di Pondok Pesantren Tebuireng dan Pondok Pesantren Unggulan Universitas Islam Indonesia. Selain mengajar, juga sering diminta menjadi ahli dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat menjadi mahasiswa hingga kini, aktif menulis opini untuk berbagai media, baik cetak maupun *online*. Tesisnya tentang Gagasan Pemberian Kewenangan Forum Konsultasi (*Consilium Forum*) Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang sedang dalam proses *editing* untuk segera diterbitkan. Saran dan kritik konstruktif dapat disampaikan melalui email: alirido@trisakti.ac.id.



Sulit rasanya menolak fakta bahwa arus demokrasi Indonesia kini cenderung bergerak secara liar ke arah kebebasan, namun begitu lamban bergeser pada area kesejahteraan. Demokrasi saat ini, juga seolah digunakan sekedar untuk memperkuat basis-basis kekuasaan namun abai melakukan internalisasi nilai dan kultur yang berkeadaban. Dalam konteks demikian, terkesan adanya situasi paradoks. Kendati terdapat lembaga-lembaga demokratis, tapi tak sedikit yang menyalahgunakannya demi dan atas nama demokrasi. Apakah kondisi semacam ini yang dinamakan demoriter?, sebuah watak dan wajah baru dari sikap otoriter yang berselimut di atas demokrasi dan konstitusi. Lantas apakah kondisi di Indonesia saat ini telah menuju -atau jangankan sedang berada dalam- sistem demoriter?, atau justru saat ini negara kita sedang berada di dalam sistem mobokrasi?, suatu tata pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh orang yang tak paham dengan sistem pemerintahan. Uraian di dalam buku ini seolah memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa anomali demokrasi begitu terasa terjadi.

 : relasiintimedia

 : @relasiintimedia

 : Relasi Inti Media

 RELASI
INTI MEDIA

ISBN (13) 978-602-0187-72-8



9 786020 787718